

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

T E S I S

Oleh

**ADEARMAN PURBA
027018002/EP**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2 0 0 6**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

T E S I S

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ekonomi
Pembangunan (EP) pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara**

Oleh

**ADEARMAN PURBA
027018002/EP**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2 0 0 6**

**Judul Tesis : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

Nama Mahasiswa : Adearman Purba
Nomor Pokok : 027018002
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

(Dr. Murni Daulay, SE, M.Si)
Ketua

(Prof. Dr. Sa'ad Afifuddin, M.Ec)
Anggota

Ketua Program Studi

Direktur

(Dr. Murni Daulay, SE, M.Si)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc)

Tanggal Lulus : 21 September 2006

Telah diuji pada

Tanggal : 21 September 2006



PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua	: Dr. Murni Daulay, SE, M.Si
Anggota	: 1. Prof. Dr. Sa'ad Affifuddin, M.Ec
	2. Dr. Irsad Lubis, M.Soc, Sc
	3. Dr. Zahari Zein, MS
	4. Drs. Rujiman, MA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dengan metode OLS dan faktor-faktor tersebut ialah pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, jumlah tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya selama kurun waktu 1976 - 2003.

Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun relatif meningkat setelah krisis moneter walaupun laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya krisis moneter. Untuk laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun ternyata masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan tenaga kerjanya, kecuali pada tahun 1998 yang mengalami pertumbuhan negatif.

Sementara itu dalam prioritas kebijakan anggaran, ternyata rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran pembangunan di kabupaten Simalungun masih lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran rutin selama kurun waktu 1976 – 2003. Selanjutnya untuk kontribusi sektoral, sektor pertanian masih mendominasi dalam pembentukan PDRB kabupaten Simalungun, diikuti sektor industri, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Namun pada tahun 2003, sektor jasa-jasa telah menggeser peranan sektor perdagangan di kabupaten Simalungun.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin berpengaruh negatif dan positif tetapi kedua variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun. Sedangkan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun dengan tingkat kepercayaan yang berbeda. Dengan demikian selama kurun waktu penelitian, pengeluaran pemerintah di Kabupaten Simalungun, baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin belum memberikan dampak yang berarti dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci : Pengeluaran Pembangunan, Pengeluaran Rutin, Jumlah Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

This research aim to analysing factors influencing growth of chartered investment counsel in Sub-Province Simalungun with method OLS and the factors is disbursement of development, disbursement of routine, amount of labours, and growth of chartered investment counsel year before all during range of time of 1976 - 2003.

Analysis earnings yield descriptively indicate that growth of chartered investment counsel in sub-province Simalungun is relative increased after the growth rate although monetary crisis still be lower compared by is economic growth rate before the happening of monetary crisis. For economic growth rate in Sub-Province Simalungun simply still be higher if compared with the labour growth rate, is except to year 1998 experiencing growth of negativity.

Meanwhile in preference of policy of budget, simply average of growth rate of disbursement of development in sub-province Simalungun still be bigger compared with average of growth rate of disbursement of routine during range of time of 1976 - 2003. Hereinafter for sectoral contribution, agricultural sector still predominate in forming of PDRB sub-province Simalungun, followed by industrial sector, services sector and commercial sector. But in the year 2003, sector of role of have shifted role of commercial sectors in sub-provinces Simalungun.

Estimation earnings yield indicate that disbursement of development and disbursement of routine have an effect on negativity and positive but both the variable don't give influence meaning statistically to growth of chartered investment counsel in sub-province Simalungun. While summing up labours and growth of chartered investment counsels year before all have an effect on positive and signifikan statistically to growth of chartered investment counsels in sub-provinces Simalungun with level of different trusts. Thereby during research range of time, disbursement of government in Sub-Province Simalungun, good disbursement of development and also disbursement of routine not yet give impact meaning in pushing increasing of growth of chartered investment counsel in Sub-Province Simalungun.

Keyword : Disbursement Of Development, Disbursement Of Routine, Amount Of Energies Worked, Growth Of Chartered investment counsel.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberi kesehatan, ilmu pengetahuan serta kesempatan kepada penulis mengikuti perkuliahan, terutama dalam penyusunan tesis yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun " sebagai syarat akhir dalam meraih gelar Magister Sain (M.Si) pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara ini dapat diselesaikan.

Dengan tulus penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, materi, dan dukungan moral kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai proses penyusunan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam perjalanan untuk menyelesaikan pendidikan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(k), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, selaku direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Dr. Murni Daulay, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan sekaligus ketua pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Syaad Afifuddin, M.Ec, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Irsyad Lubis, M.Soc, SC, selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Zahari Zein, MS, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Drs. Rujiman, MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Dosen pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Buat Istriku tercinta Enny Idawati Saragih, yang telah banyak berkorban selama penulis menjalani perkuliahan, terima kasih atas pengorbanan, Doa

dan penertiannya selama ini, dan teruntuk putriku yang kusayangi Gresya Purba.

10. Buat Kedua Orang Tuaku St. A. Purba dan Kasmina Saragih, juga Bapak dan Ibu Mertua St. Parmen Saragih dan Rumei Purba, yang telah banyak memberikan dukungan doa, moril dan materil hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
11. Rekan-rekan Magister Ekonomi Pembangunan, dan seluruh pegawai Administrasi Sekolah Pascasarjana USU serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan saran, pendapat serta pandangannya sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya karena keterbatasan penulis, tesis ini masih jauh dari yang sempurna sehingga diperlukan masukan dan saran guna perbaikan, namun harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhann Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan, dan semoga kemudahan dan kelapangan selalu menyertai kita semua.

Medan, November 2008

Adearman Purba

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : A Dearman Purba
2. Tempat/Tanggal Lahir : Smanabun, 1 september 2008
3. Pekerjaan : PNS (Staf Pemkab Simalungun)
4. Agama : Kristen Protestan
5. Istri : Enny Idawati Saragih
6. Anak : Gresya Purba
7. Orang Tua :
 - a. Ayah : St. Amat Purba, BA
 - b. Ibu : Kasmina Saragih
8. Mertua :
 - a. Bapak Mertua : St. Parmen Saragih
 - b. Ibu Mertua : Rumei Purba
9. Alamat : Jl. Pisang kipas No. 4 Kelurahan Bah Kapul
Kecamatan Siantar Martoba Kota nPematang
Siantar.
10. Pendidikan :
 - a. SD Negeri Dolok Saribu Bangun : Simanabun, Lulus Tahun 1982
 - b. SMP Negeri, Negeri Dolok : Negeri Dolok, Lulus Tahun 1985
 - c. SMA Negeri Satu Tebing Tinggi : Tebing Tinggi, Lulus Tahun 1988
 - d. S.I Ekonomi Study Pembangunan : Universitas HKBP Nommensen
Lulus Tahun 1993
 - e. S.2 Ekonomi Pembangunan : Universitas Sumatera Utara Lulus
Tahun 2006

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	8
2.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi	9
2.2.1. Teori Pertumbuhan Klasik	10
2.2.2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik	11
2.2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern	12
2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	13
2.4. Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah	15
2.4.1. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes	15
2.4.2. Pembangunan dan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah..	15
2.4.3. Hukum Wagner	17
2.4.4. Teori Peacock dan Wiseman	17
2.5. Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	18
2.6. Analisis Teori Mikro	20
2.7. Hubungan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	21
2.8. Penelitian Sebelumnya	24
2.9. Hipotesis Penelitian	27
3.0. Kerangka Pemikiran	28

BAB III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2. Jenis dan Sumber Data	29
3.3. Model Analisis	30
3.4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	30
3.4.1. Uji Multikolinieritas	31
3.4.2. Uji Linieritas	32
3.4.3. Uji Autokorelasi	32
3.5. Batasan Operasional	33
3.6. Metode Analisis	34
 BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 35
4.1. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun	36
4.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	42
4.3. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja	47
4.4. Analisis dan Hasil Estimasi	49
4.4.1. Interpretasi Hasil Estimasi	51
4.4.1.1. Variabel Pengeluaran Pembangunan (PP)	52
4.4.1.2. Variabel Pengeluaran Rutin (PR)	53
4.4.1.3. Variabel Jumlah Tenaga kerja (TK)	55
4.4.1.4. Variabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun Sebelumnya {PE(-I)}	56
4.4.2. Analisis Overall-Test	57
4.5. Uji Asumsi Klasik	58
4.5.1. Multikolinieritas	58
4.5.2. Korelasi Serial (Autokorelasi)	59
4.5.3. Uji Linearitas (<i>Ramsey Reset Test</i>)	60
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	 61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran dan Implikasi Kebijakan	62
 DAFTAR PUSTAKA	 64

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
4.1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Jutaan Rupiah)	37
4.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	39
4.3.	Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Simalungun (%)	41
4.4.	Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, Pengeluaran Rutin, dan Persentase Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Simalungun (Jutaan Rupiah)	46
4.5.	Hasil Estimasi Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun dengan Metode OLS	50
4.6.	Hasil Estimasi Correlation Matrix	58
4.7.	Hasil Estimasi Uji LM Test	59
4.8.	Hasil Estimasi Ramsey Test	60

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
2.1.	Kerangka Pemikiran	28
4.1.	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran Rutin Kabupaten Simalungun Tahun 1977 – 2003 (persen)	43
4.2.	Persentase Antara Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran Rutin Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 1977 – 2003 (persen)	45
4.3.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Simalungun Tahun 1977 – 2003 (persen)	48

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Hal
1.	Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PE), Pengeluaran Pembangunan (PP), Pengeluaran Rutin (PR), Tenaga kerja (TK) Kabupaten Simalungun Tahun 1976 – 2003	67
2.	Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun Tahun 1976 – 2003 dengan Metode OLS	68
3.	Hasil Estimasi Correlation Matrix	69
4.	Hasil Estimasi LM Test	69
5.	Hasil Estimasi Ramsey Test	70

DAFTAR SINGKATAN



APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	=	Badan Pusat Statistik
ICOR	=	Incremental Capital Output Ratio
IMF	=	International Monetary Fund
OLS	=	Ordinary Least Square
PDB	=	Produk Domestik Bruto
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
PE	=	Pertumbuhan Ekonomi
PP	=	Pengeluaran Pembangunan
PR	=	Pengeluaran Rutin
TK	=	Tenaga Kerja
UU	=	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi secara makro adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi disamping dua tujuan lainnya yaitu pemerataan dan stabilitas. Indikator ini penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, karena dapat memberikan gambaran makro atas kebijakan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat

dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami kemunduran.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian moderen. Pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit ekonomi lainnya seperti rumah tangga dan perusahaan.

Bagi negara sedang berkembang, campur tangan pemerintah relatif besar sehingga peranan pemerintah dalam perekonomian juga relatif besar. Pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produksi domestik atau Produk Domestik Bruto (PDB), sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

Seiring dengan kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun, ternyata kegiatan pemerintah nampaknya semakin meningkat dan semakin kompleks pula. Besar kecilnya peranan pemerintah dalam sebuah perekonomian dapat dilihat dari besar

kecilnya proporsi pengeluaran pemerintah terhadap total kegiatan perekonomian atau pendapatan nasional. Berdasarkan data yang disajikan oleh IMF (*International Monetary Fund*) tentang pengeluaran pemerintah dari 80 negara selama tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 yang diperoleh dari *Government Statistics Yearbook*, yang terdiri dari 18 negara yang berpendapatan rendah (*low-income countries*), 36 negara berpendapatan menengah (*middle-income countries*) dan 26 negara berpendapatan tinggi (*high-income countries*), dimana data tersebut menggambarkan bahwa proporsi dari pengeluaran pemerintah untuk pengeluaran rutin lebih besar di negara yang berpendapatan tinggi dibandingkan dengan yang berpendapatan menengah dan berpendapatan rendah. Begitu juga besarnya pengeluaran pemerintah apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional negara tersebut (IMF, 1993).

Anggaran belanja pemerintah daerah baik sebagai belanja rutin maupun belanja pembangunan merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu meskipun investasi swasta terus merosot namun pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh faktor konsumsi. Para ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang semata ditopang oleh konsumsi tidak dapat meningkatkan pertumbuhan yang maksimal seperti yang ditargetkan pemerintah sekitar 5,4 persen di tahun 2005.

Sebagai sarana utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yaitu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan suatu rencana kerja keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan dimulainya penerapan sistim penganggaran terpadu yang meleburkan anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran. Penggabungan belanja rutin (meliputi gaji, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja barang) dengan belanja pembangunan diharapkan mengurangi tumpang-tindih alokasi. Hal ini seiring dengan apa yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 8 disebutkan bahwa "APBD disusun dengan Pendekatan Anggaran Kinerja" dan anggaran kinerja tersebut merupakan suatu sistem penganggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya (pengeluaran) atau input yang ditetapkan (Departemen Keuangan RI, 2004).

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik perlu dilakukan perubahan klasifikasi yang digunakan secara

internasional. Perubahan dalam pengelompokkan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah dan menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi dan penumpukan serta penyimpangan anggaran. Sementara itu penguangan-penguangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) sebagaimana banyak dilakukan negara maju.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu objek penelitian yang banyak menarik minat dari para peneliti. Hal ini tercermin dari banyaknya teori-teori yang membahas dan mengkaji tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap

pertumbuhan ekonomi. Penelitian tentang sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan baik secara internasional maupun nasional bahkan regional. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul : *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun"*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu :

Apakah pengeluaran rutin pemerintah daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.

1. Apakah pengeluaran pembangunan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.
2. Apakah tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.
3. Apakah pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di kabupaten Simalungun.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah :

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran rutin pemerintah daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.

Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun.

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di kabupaten Simalungun.

5 Untuk mengetahui variabel mana yang paling kuat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun selama tahun 1976 – 2003.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Antara lain :

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Simalungun dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk meneliti mengenai pengeluaran pemerintah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999 : 8). Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu : proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi mencakup pertumbuhan GDP total dan pertumbuhan penduduk.

Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka waktu suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila dalam waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output per kapita. Tentu saja dalam waktu tersebut bisa terjadi

kemerosotan output per kapita, karena gagal panen misalnya, tetapi apabila dalam waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan kecenderungan menaik maka dapat kita katakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan menaik bagi output per kapita saja tidak cukup, tapi kenaikan output harus bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Dengan kata lain proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self-generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan dalam periode-periode selanjutnya.

2.2. Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999 : 10).

Di dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Pada ekonom mempunyai pandangan atau persepsi yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan dapat dikelompokkan kedalam beberapa teori, yaitu:

2.2.1. Teori Pertumbuhan Klasik

yang mencakup teori pertumbuhan dari Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill.

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan lisezfaire atas system mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi dilambangkan oleh fungsi :

$$O = Y = f(K, L, R, T)$$

Dimana:

O = Output
Y = Pendapatan
K = Kapital
L = Labor
R = Tanah
T = Teknologi

Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Manusia dengan melakukan spesialisasi akan meningkatkan produktivitas. Smith bersama dengan Ricardo percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Tanah bagi kaum klasik merupakan faktor yang tetap.

Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung akibat adanya pembentukan akumulasi modal. Akumulasi tercipta karena adanya surplus dalam ekonomi. Namun David Ricardo pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pada jangka panjang (long run) perekonomian akan menuju kepada keadaan yang stationer, yaitu dimana pertumbuhan ekonomi tidak terjadi sama sekali.

Menurut Ricardo peranan teknologi akan dapat menghambat berjalannya *the law of diminishing return*, walaupun teknologi bersifat rigid (kaku), dan hanya dapat berubah dalam jangka panjang. Bagi kaum klasik, keadaan stationer merupakan keadaan ekonomi yang sudah mapan dimana masyarakat sudah hidup sejahtera dan tidak ada lagi pertumbuhan yang berarti.

2.2.2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

yang diwakili teori pertumbuhan Joseph Schumpeter, Alfred Marshal, Robert Solow dan Trevor Swan.

Pendapat neo-klasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut : (Suryana, 2000 : 58)

1. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi;
2. Perkembangan merupakan proses yang gradual;
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif;
4. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan;
5. Aspek Internasional merupakan faktor bagi perkembangan.

Menurut neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingkat investasi. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga turun, hasrat menabung turun, Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional.

2.2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

Meliputi teori pertumbuhan Rostow, Kuznet, dan Teori Harrod-Domar.

Menurut Rostow (dalam Suryana, 2000 : 60) pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern , melalui tahapan:

1. Masyarakat tradisional (The traditional society)
2. Prasyarat lepas landas (The precondition for take-off)
3. Lepas landas (The take-off)
4. Tahap kematangan (The drive to maturity)
5. Masyarakat berkonsumsi tinggi (The age of high mass consumption)

Kuznet (dalam Suryana, 2000 : 61) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya.

Harrod-Domar (dalam Suryana, 2000 : 62) mengembangkan analisa Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar terdapat hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal (C) dan jumlah produksi nasional (Y).

$$\text{Growth} = \frac{S}{\text{COR}}$$

Growth = Pertumbuhan
S = Saving
COR = Capital Output Ratio

2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumberdaya manusia, modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya

merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Sumber Alam.
2. Akumulasi modal
3. Organisasi
4. Kemampuan Teknologi.
5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi.

Faktor-faktor non ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor non ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan adalah:

1. *Faktor Sosial*. Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. *Faktor Manusia*. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.
3. *Faktor Politik dan Administratif*. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang.

Menurut Nurkse (dalam Jhingan, 1995 : 93) : “Pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang histories”. Didalam Pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik dan psikologis adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi.

2.4. Teori – Teori Pengeluaran Pemerintah

2.4.1. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan sumber legitimasi kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel – variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government expenditure*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996 : 161).

2.4.2. Pembangunan dan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut (Mangkoesobroto, 2001 : 171).

Tahap awal :

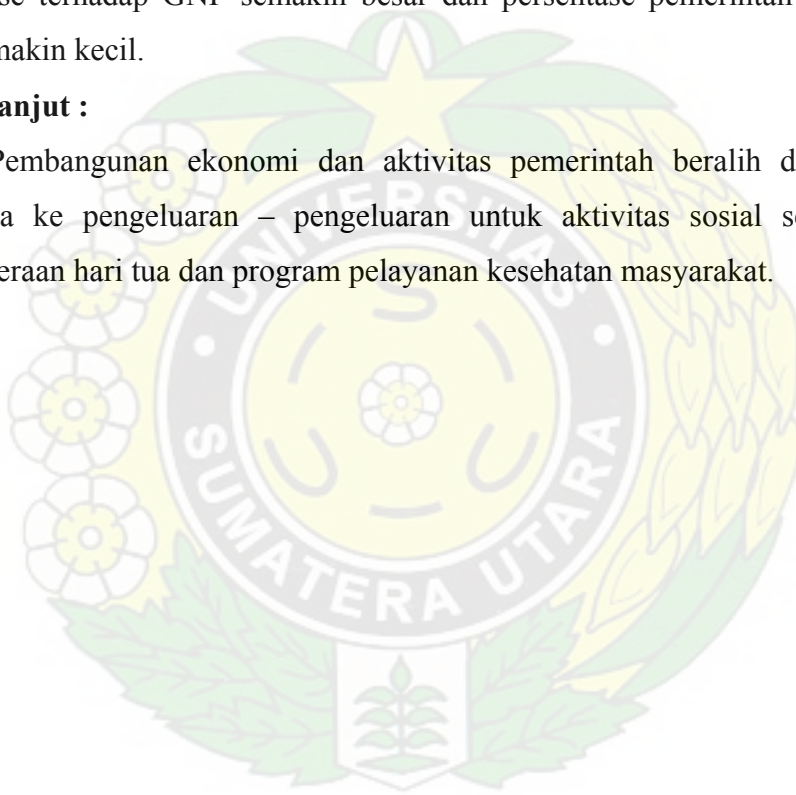
Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Tahap Menengah :

Investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

Tahap lanjut :

Pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.



2.4.3. Hukum Wagner

Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesoebroto, 2001 : 173). Hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Keterangan :

GpC : Pengeluaran pemerintah per kapita
YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita
t : indeks waktu (tahun)

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demografi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1996 : 162).

2.4.4. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman menyatakan sebagai berikut: perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tariff pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

2.5. Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi sebagai salah satu komponen penting dari *Aggregate Demand*, (AD) merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Dengan semakin berkembangnya pasar yang berarti juga volume kegiatan produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan di dalam negeri semakin meningkat dan seterusnya, maka akan terciptalah pertumbuhan ekonomi.

Korelasi (hubungan) positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Di dalam model ini, investasi dan ICOR (*the incremental capital output ratio*) merupakan dua variabel fundamental, yang secara garis besar dapat dijelaskan seperti berikut ini. Investasi yang dimaksud adalah investasi neto, yang didefinisikan sebagai perubahan/penambahan stok barang modal, atau

$$I_t = \Delta K_t \dots\dots\dots (1)$$

$$= K_t - K_{t-1} \dots\dots\dots (2)$$

Sementara itu, ICOR adalah kebalikan dari rasio pertumbuhan output terhadap pertumbuhan investasi, yang pada intinya menunjukkan hubungan antara penambahan stok barang modal dan pertumbuhan output, atau melihat seberapa besar

peningkatan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (target). Hubungan tersebut digambarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = y.K \dots\dots\dots (3)$$

atau

$$1/y = K/Y \dots\dots\dots (4)$$

Dimana y = rasio output-kapital, dan $1/y$ = rasio kapital-output (COR). Dalam perkembangannya, pemakaian konsep COR mengalami modifikasi menjadi ICOR dengan rumus sebagai berikut :

$$ICOR = (\Delta K/Y) / (\Delta Y/Y) \dots\dots\dots (5)$$

atau

$$ICOR = (I/Y) / (\Delta Y/Y) \dots\dots\dots (6)$$

Dimana sejak per definisi $\Delta K = I$.

Berdasarkan hasil-hasil studi kuantitatif yang telah dilakukan pada tahun 1990-an, misalnya Levine dan Renelt, 1992 (dalam Tambunan, 2001 : 42) menemukan bukti adanya korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu studi-studi lain yang memakai analisis fungsi produksi neo-klasik menemukan bahwa investasi, bukan progres teknologi, merupakan faktor utama dibalik pertumbuhan ekonomi yang cemerlang yang dialami negara-negara Asia Tenggara. Argumen utama dibalik hasil dari studi-studi ini adalah

bahwa investasi menambah jumlah stok kapital per pekerja dan oleh karena itu menaikkan produktivitas.

2.6. Analisis Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran akan barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta (Mangkoesoebroto, 2001 : 177-180).

Perkembangan pengeluaran pemerintah tergantung pada :

1. Permintaan barang publik antara lain karena jumlah penduduk, pendapatan dan gaya hidup
2. Pola kegiatan pemerintah dalam proses produksi
3. Kualitas barang publik yang dihasilkan
4. Harga-harga faktor produksi di pasar.

Meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun menggambarkan kegiatan pemerintah semakin meningkat. Dengan mengalokasikan dana secara tepat maka efisiensi pengeluaran pemerintah dapat ditingkatkan sehingga produksi nasional pun diharapkan meningkat.

2.7. Hubungan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antara daerah yang mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral akan menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian nasional (Kusumosuwidho, 1981 : 193).

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya, dan karena manusialah yang menggerakkan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang (Bakir dan Manning, 1984 : 29).

Tenaga kerja (*manpower*) merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Dimana tiap-tiap negara memberi batasan umur yang berbeda (Simanjuntak, 1998 : 2).

Pengertian bekerja yang digunakan dalam sensus penduduk 1990 demikian juga dalam Sakernas adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu. Untuk selanjutnya penduduk yang bekerja tersebut dinamakan sebagai angkatan kerja yang terserap atau kesempatan kerja.

Mulai Repelita VII batasan angkatan kerja disesuaikan menjadi penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang terdiri dari :

1. Mereka yang selama seminggu yang lalu sebelum waktu pencacahan mempunyai pekerjaan.
2. Punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab menunggu panen, cuti dan sebagainya.
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat kerja.

Tidak semua angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, tetapi hanya oleh mereka yang bekerja. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu struktur umur penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dalam suatu negara atau daerah pada suatu waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja ini disebut tingkat partisipasi angkatan kerja.

Perkembangan angkatan kerja disebabkan oleh *trend* demografi di masa lalu dan juga sebagai tanggapan (*respons*) dari suatu keadaan perekonomian. Dengan demikian untuk membahas ketenagakerjaan di daerah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengkaji unsur-unsur demografi yang mempengaruhi karakteristik tenaga kerja tersebut antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dilanjutkan dengan struktur serta pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dapat menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi dengan pengertian bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga sebagai pasar barang dan jasa. Dalam hal ini, kebutuhan tenaga kerja tergantung dari kesempatan kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian.

Selanjutnya, secara makro dapat dikatakan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja sangat terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan kesempatan kerja

yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas (Widodo, 1990 : 110).

2.8. Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan rujukan yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi, antara lain :

Devarajan, Swaroop dan Zou (1996) mengemukakan bahwa di 43 negara berkembang selama 20 tahun menunjukkan peningkatan pengeluaran rutin dan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran pembangunan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kweka dan Morrissey (2000), menunjukkan bahwa meningkatnya pengeluaran produktif (investasi fisik) ternyata memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanzania. Sementara pengeluaran untuk konsumsi terutama konsumsi swasta berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran publik untuk human capital tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Tanzania. Disamping itu dari hasil estimasi memperlihatkan bahwa pengeluaran investasi publik di Tanzania tidak produktif dan ini berlawanan dengan pendapat yang lebih luas, dimana pengeluaran konsumsi pemerintah Tanzania telah menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Lin (Parulian, 2003) yang menggunakan sampel 62 negara (20 negara yang tergolong negara maju dan 42 negara sedang berkembang) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah tidak signifikan untuk 42 negara sedang berkembang, akan tetapi memberikan pengaruh yang signifikan untuk 20 negara maju.

Sjoberg (2003) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi, investasi dan transfer dengan pertumbuhan ekonomi di Swedia selama kurun waktu 1960 – 2001.

Disamping itu investasi swasta, konsumsi swasta dan tingkat suku bunga memiliki tanda yang sesuai dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Swedia untuk kurun waktu yang sama.

Hanum (2004) yang menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) antara lain menemukan bahwa untuk variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil ini secara tegas mendukung hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *ceteris paribus*.

Bustaman (2004) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Propinsi Riau tahun berjalan secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya. Sementara itu pengeluaran pembangunan tahun berjalan secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan tahun sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Riau.

Dan hasil penelitian Nurlina (2004) menunjukkan bahwa semua variabel bebas (pengeluaran rutin, pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembangunan dua tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NAD. Sementara itu untuk pengeluaran pembangunan memiliki pengaruh yang negatif tetapi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NAD selama kurun waktu penelitian.

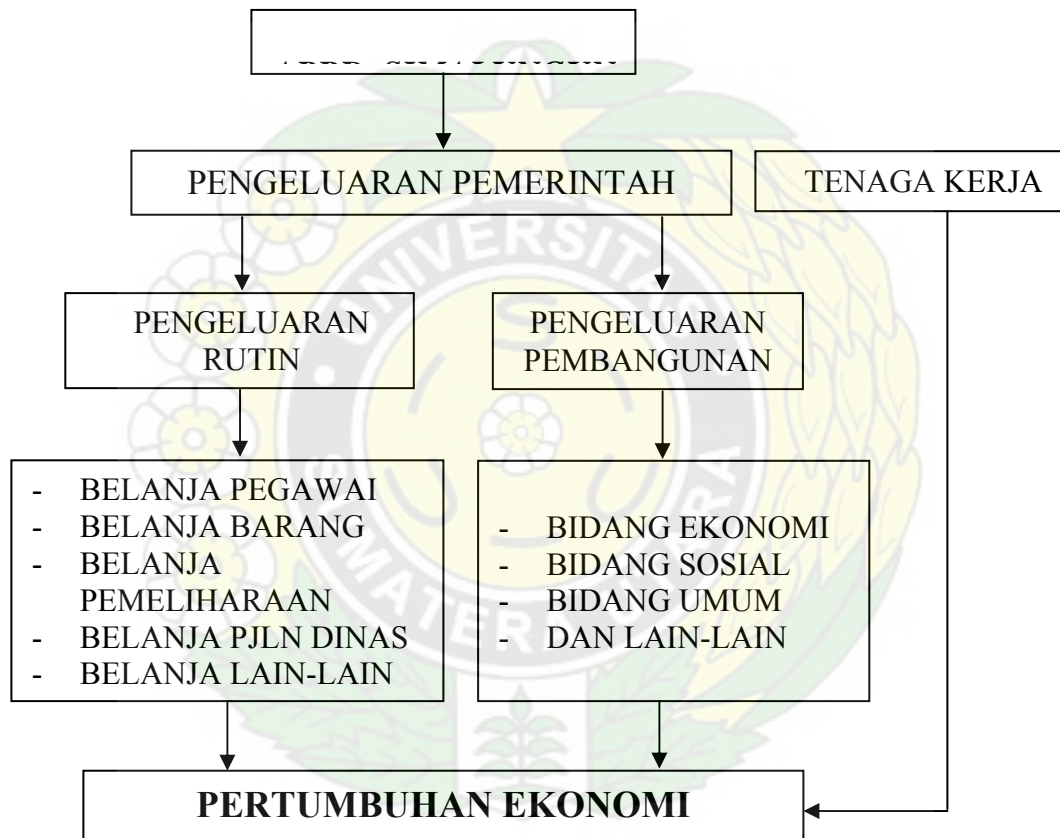
2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

4. Terdapat pengaruh yang positif antara pengeluaran rutin pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun, *ceteris paribus*.
5. Terdapat pengaruh yang positif antara pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun, *ceteris paribus*.
6. Terdapat pengaruh yang positif antara tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun, *ceteris paribus*.
7. Terdapat pengaruh yang positif antara pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya

dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di kabupaten Simalungun, *ceteris paribus*.

3.0. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun selama kurun waktu 1976 - 2003. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* (runtun waktu) selama kurun waktu 1976 - 2003. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Sumatera Utara dalam Angka dan Simalungun dalam Angka pada Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber-sumber lainnya, yaitu jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin (PR) maupun pengeluaran pembangunan (PP) dalam satuan miliar rupiah, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada semua sektor (TK) dalam satuan orang, serta pertumbuhan ekonomi (PE) yang diproxy dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dalam satuan miliar rupiah.

3.3. Model Analisis

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun, maka dilakukan analisis dengan menggunakan model persamaan *Ordinary Least Square* (OLS). Fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$PE = f \{PP, PR, TK, PE(-1)\}$$

Kemudian dari fungsi tersebut ditransformasi ke dalam model persamaan ekonometrika dengan spesifikasi model, yakni :

$$PE = \beta_0 + \beta_1 PP + \beta_2 PR + \beta_3 TK + \beta_4 PE(-1) + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- PE = pertumbuhan ekonomi yang diproxy dengan PDRB (rupiah)
- PR = pengeluaran rutin pemerintah daerah (rupiah)
- PP = pengeluaran pembangunan pemerintah daerah (rupiah)
- TK = jumlah tenaga kerja yang bekerja pada semua sektor (orang)
- PE(-1) = pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang diproxy PDRB (rupiah)
- $\beta_0 - \beta_3$ = koefisien regresi
- ε = variabel gangguan (*error term*)

3.4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Ada beberapa permasalahan yang akan terjadi dalam model regresi linier dimana secara statistik permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang telah ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang

terbentuk. Untuk itu perlu melakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yang terdiri dari : (Insukindro, 2000)

3.4.1. Uji Multikolinieritas

Interpretasi dari persamaan regresi linier secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. Jika dalam sebuah persamaan terdapat multikolinieritas maka akan menimbulkan beberapa akibat, untuk itu perlu dideteksi multikolinieritas dengan besaran-besaran regresi yang didapat sebagai berikut :

1. Variasi besar (dari taksiran OLS).
2. Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar sehingga standar error besar yang berdampak pada interval kepercayaan lebar).
3. Uji-t (t rasio) tidak signifikan. Suatu variabel bebas yang signifikan baik secara substansi maupun secara statistik jika dilakukan regresi sederhana maka terjadi bias dan tidak signifikan karena variasi besar akibat adanya kolinieritas. Bila standar error terlalu besar maka besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan.
4. R^2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji-t.
5. Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

3.4.2. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar. Apakah fungsi yang digunakan sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. Apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam model. Untuk uji linearitas dalam penelitian ini digunakan Uji Ramsey (Ramsey RESET test), yaitu dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Kriteria keputusannya sebagai berikut :

1. Bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak ditolak.
2. Bila nilai $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk fungsi linier adalah benar tidak dapat ditolak.

3.4.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam distribusi. Dengan menggunakan lambang $E(\mu_i, \mu_j) = 0 ; i \neq j$. Secara sederhana dikatakan bahwa model klasik mengasumsikan unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur distribusi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan uji *Lagrange Multiplier Test* (LM Test). Dengan membandingkan nilai X^2_{hitung} dengan X^2_{tabel} , dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Jika nilai $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak.
2. Jika nilai $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.

3.5. Batasan Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan operasional dari variabel tersebut sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah (PE) adalah total output yang dihasilkan oleh daerah dalam satu tahun yang direpresentasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan harga berlaku dalam satuan miliar rupiah.
2. Pengeluaran rutin pemerintah daerah (PR) adalah total anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran rutin pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam satuan miliar rupiah.
3. Pengeluaran pembangunan pemerintah daerah (PP) adalah total anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam satuan miliar rupiah.

4. Tenaga kerja (TK) adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada semua sektor di kabupaten Simalungun dalam satuan orang.

3.6. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hal ini dikarenakan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun. Dan sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengolah data tersebut adalah dengan Program Eviews versi 4.1.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam perekonomian modern, pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Di samping pemerintah memang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya seperti sektor rumah tangga dan sektor swasta.

Kegiatan pemerintah dalam perekonomian tampaknya semakin besar dan terus meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. Besar kecilnya kegiatan pemerintah atau peranan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perekonomian dapat dilihat dari besarnya bagian untuk pengeluaran pemerintah dari seluruh perekonomian atau pendapatan nasional.

Kebanyakan negara-negara sedang berkembang, peranan pemerintah dalam perekonomian relatif masih cukup besar dimana pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, praktis dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran tersebut dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan aggregate yang kenaikannya

akan mendorong produksi domestik atau Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan analisis untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi di kabupaten simalungun dengan melakukan analisis deskriptif untuk variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, baik pembangunan pembangunan maupun pengeluaran rutin dan perkembangan tenaga kerja untuk kurun waktu 1976 - 2003.

4.1. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Hal ini dapat diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Dengan kata lain PDRB merupakan tolok ukur perkembangan ekonomi secara regional, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi regional yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang turut memberi andil dalam pertumbuhan produksi dari masing-masing sektor. Perkembangan PDRB baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dapat mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah perkembangan ini tentunya akan dapat menggambarkan kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut selama kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang diukur berdasarkan PDRB harga konstan menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Perkembangan PDRB di suatu daerah dapat dilihat dari dua sisi pendekatan yaitu dari sisi sektoral dan sisi penggunaan. PDRB dari sisi sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993				
		1997	2000	2001	2002	2003
1.	Pertanian	1.234.650	1.287.250	1.353.001	1.405.960	1.458.060
2.	Penggalian	910	920	990	1.015	1.050
3.	Industri	305.540	353.300	358.520	369.178	386.811
4.	Listrik, gas dan air minum	5.180	5.290	5.490	5.579	5.805
5.	Bangunan	31.420	24.920	28.190	31.038	31.996
6.	Perdagangan	121.700	139.360	149.870	158.958	164.652
7.	Pengangkutan	79.000	64.730	70.370	72.527	76.850
8.	Bank dan Lembaga Keuangan	35.690	39.690	42.320	45.349	47.082
9.	Jasa-jasa	106.320	118.560	123.100	135.964	163.461
PDRB		1.920.410	2.034.030	2.131.850	2.225.568	2.335.767
Pertumbuhan Ekonomi (%)		7,47	3,88	4,81	4,40	4,95

Sumber : Simalungun dalam Angka (BPS)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun pasca krisis moneter. Sebelum krisis moneter melanda

Indonesia dan tentunya juga terjadi di kabupaten Simalungun, pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni sebesar 7,47 persen pada tahun 1997. Namun pasca krisis moneter pada tahun 1998, laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun mengalami pertumbuhan yang negatif, yakni menjadi sebesar -2,76 persen dan pada tahun 1999, kabupaten Simalungun mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang positif dengan pertumbuhan sebesar 4,85 persen.

Memasuki tahun 2000, kondisi perekonomian di kabupaten Simalungun belum menunjukkan kondisi yang stabil. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun pada tahun 2000 yang mengalami sedikit kelesuan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,88 persen. Akan tetapi, sejak tahun 1999, kondisi perekonomian di kabupaten Simalungun sudah memperlihatkan kondisi ekonomi yang stabil dan mulai mengalami sedikit kemajuan yang berarti walaupun masih jauh dari kondisi sebelum terjadinya krisis moneter.

Kemajuan ekonomi ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun 1999 - 2003, kecuali pada tahun 2002, yang sedikit mengalami penurunan menjadi 4,40 persen. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 1999 – 2003, kondisi perekonomian di kabupaten Simalungun sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang berarti dan

sedikit mengalami kemajuan yang berarti bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter yang mengalami pertumbuhan hingga negatif.

Sementara itu, dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi di kabupaten Simalungun berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (Tabel 4.2) memperlihatkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam pembentukan PDRB di kabupaten Simalungun, yang diikuti sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 1997, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar hingga 64,38 persen terhadap pembentukan PDRB kabupaten simalungun, sedangkan sektor industri sebesar 16,47 persen dan sektor perdagangan sebesar 6,38 persen serta sektor jasa-jasa hanya sebesar 5,28 persen.

Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku				
		1997	2000	2001	2002	2003
1.	Pertanian	1.424.030	2.249.980	2.588.00	2.819.022	2.928.657
2.	Penggalian	1.160	1.450	1.700	2.030	2.104
3.	Industri	364.300	696.150	721.600	763.701	811.035
4.	Listrik, gas dan air minum	6.230	9.270	10.100	10.513	11.228
5.	Bangunan	35.990	61.110	69.140	76.879	80.305
6.	Perdagangan	141.220	291.140	349.510	380.385	392.562
7.	Pengangkutan	84.550	103.720	119.030	139.704	157.256
8.	Bank dan Lemb. Keuangan	37.690	53.400	58.850	65.250	69.458
9.	Jasa-jasa	116.790	240.040	292.750	352.868	428.951
PDRB		2.211.980	3.706.300	4.210.690	4.610.352	4.881.556

Sumber : Simalungun dalam Angka (BPS)

Kemudian untuk tahun 2003, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Simalungun ternyata masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor industri. Dimana untuk sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 59,99 persen terhadap pembentukan PDRB kabupaten simalungun atau sedikit mengalami penurunan sebesar 4,39 persen dibandingkan tahun 1997. Sedangkan untuk sektor industri menyumbang sebesar 16,61 persen dan hanya sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen dari tahun 1997.

Pada tahun 2003 telah terjadi pergeseran sektor antara sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB kabupaten simalungun. Pada tahun 2003, sektor jasa-jasa menempati urutan ketiga dalam menyumbang pembentukan PDRB dengan berkontribusi sebesar 8,79 persen atau meningkat sebesar 3,51 persen dari tahun 1997. Sedangkan untuk sektor perdagangan hanya menempati urutan keempat dalam pembentukan PDRB kabupaten simalungun pada tahun 2003 dengan menyumbang sebesar 8,04 persen atau sedikit mengalami peningkatan dari tahun 1997 sebesar 1,66 persen.

Dengan demikian, berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku di kabupaten Simalungun memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 1997 – 2003, tidak terjadi perubahan struktur ekonomi yang berarti di kabupaten simalungun. Hal ini terlihat dari masih mendominasinya sektor pertanian dalam pembentukan PDRB walaupun telah mengalami sedikit penurunan, namun bila dibandingkan dengan

sektor-sektor lainnya, sektor pertanian masih menjadi prioritas dalam pembentukan PDRB di kabupaten simalungun. Akan tetapi, dari keempat sektor di atas yang menunjukkan tingkat perkembangan yang lebih baik adalah sektor jasa-jasa, diikuti sektor perdagangan dan sektor industri, sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan selama kurun waktu 1997 – 2003.

Tabel 4.3. Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Simalungun (%)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
1997	64,43	18,38	17,19
2000	60,75	20,68	18,57
2001	61,50	19,02	19,48
2002	61,08	18,51	20,41
2003	60,04	18,49	21,47

Sumber : Simalungun dalam Angka (BPS)

Pada Tabel 4.3 di atas menunjukkan peranan kelompok sektoral terbesar di Kabupaten Simalungun selama kurun waktu 1997 – 2003 adalah sektor primer (pertanian dan pertambangan). Sedangkan sektor sekunder dan tersier untuk kurun waktu yang sama tidak jauh berbeda dalam memberikan peranannya. Namun, untuk sektor sekunder (industri, listrik, gas, dan air minum, serta bangunan) memperlihatkan peranannya yang terus menurun dari tahun 2000 – 2003. Sedangkan sektor tersier (perdagangan, transportasi dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, serta jasa-jasa) untuk kurun waktu yang sama menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, untuk perencanaan pembangunan kedepan, sektor tersier khususnya sektor perdagangan dan sektor jasa-

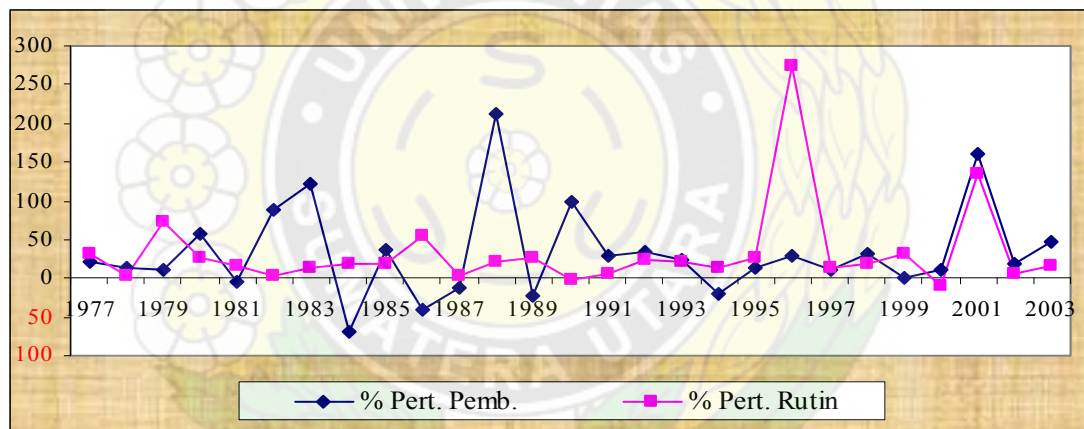
jasa, dapat menjadi sektor unggulan di kabupaten Simalungun seiring dengan semakin menurunnya sektor pertanian di masa yang akan datang.

4.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Salah satu fungsi utama anggaran pemerintah daerah adalah sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Bagi pemerintah pusat realisasi kegiatan pemerintah tercermin dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan bagi pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu pada bagian pengeluaran (belanja) yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pemerintah biasanya mencerminkan kebijakan pemerintah dalam penentuan anggarannya. Pengeluaran pemerintah terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam perekonomian yang antara lain disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam suatu perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan kegiatan sektor swasta. Dengan demikian, pemerintah harus dapat memainkan peranannya dalam mengatur tingkat alokasi penggunaan sumber-sumber daya serta distribusi pendapatan diantara konsumen sehingga dapat mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, dan tingkat stabilitas harga, serta laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perkembangan penduduk di kabupaten Simalungun menuntut adanya pengeluaran pembiayaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan tersebut berupa pengeluaran pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan kemampuan dalam menciptakan sarana dan prasarana pembangunan yang meningkat dan pada akhirnya akan mendorong *aggregate demand* juga akan meningkat, sehingga dapat merangsang kegiatan produksi daerah, yang selanjutnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.



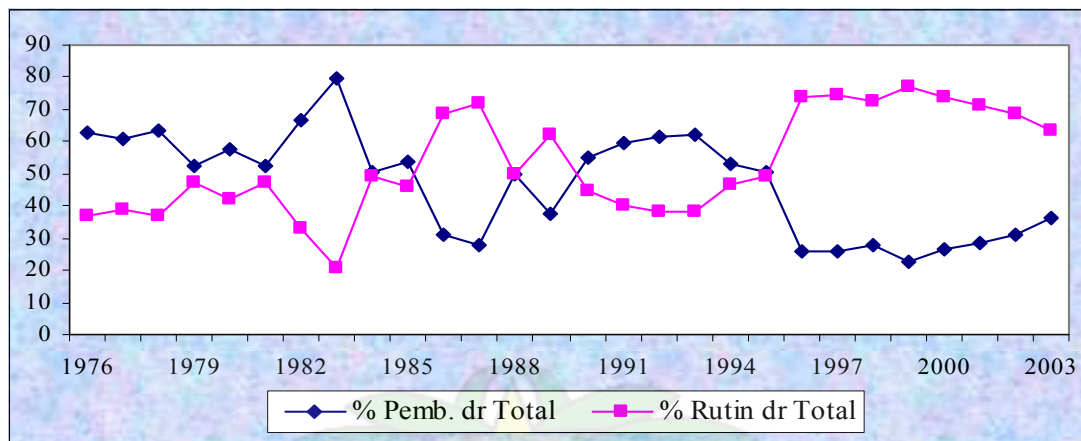
Gambar 4.1. Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran Rutin Kabupaten Simalungun Tahun 1977 – 2003 (persen)

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada umumnya, baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan untuk pembangunan di

daerah tersebut. Namun pertumbuhan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami pertumbuhan yang berbeda.

Selama kurun waktu 1976 – 2003, pertumbuhan pengeluaran pemerintah kabupaten simalungun, baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami pertumbuhan yang fluktuatif (Gambar 4.1). Namun dilihat dari perkembangannya, pertumbuhan pengeluaran rutin di kabupaten simalungun cenderung mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali pada tahun 1990 dan 2000 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,08 persen dan -9,31 persen. Sedangkan pada tahun 1984, 1986, 1989, dan 1994, pertumbuhan pengeluaran pembangunan di kabupaten simalungun mengalami pertumbuhan yang negatif di atas 20 persen.

Dilihat dari laju pertumbuhan pengeluaran pembangunan di kabupaten simalungun pernah mengalami pertumbuhan hingga 212,43 persen pada tahun 1988 dan sebesar 160,55 persen pada tahun 2001 serta 120,99 persen pada tahun 1983. Sedangkan untuk pengeluaran rutin di kabupaten simalungun, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1996 dan 2001, yaitu sebesar 273,96 persen dan 135,64 persen. Namun, bila dianalisis secara rata-rata dari laju pertumbuhannya selama kurun waktu 1976 – 2003, laju pertumbuhan pengeluaran pembangunan di kabupaten simalungun sebesar 33,18 persen dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan pengeluaran rutinnya yang tumbuh sebesar 32,76 persen.



Gambar 4.2. Persentase antara Pengeluaran Pembangunan dan Pengeluaran Rutin Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 1977-2003 (Persen)

Selanjutnya, apabila dianalisis dari persentase pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin di kabupaten simalungun terhadap total pengeluaran pemerintahnya maka dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 4.2 di atas. Berdasarkan data yang ada (Gambar 4.2 dan Tabel 4.4), persentase pengeluaran pemerintah kabupaten simalungun baik untuk pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal.

Pertama, pada tahun 1976 – 1985, persentase pengeluaran pembangunan terhadap total pengeluaran pemerintah di kabupaten simalungun ternyata lebih besar dibandingkan dengan persentase pengeluaran rutinnya. Kedua, pada tahun 1986 – 1989, persentase pengeluaran rutin di kabupaten simalungun menunjukkan persentase yang lebih besar dari persentase pengeluaran pembangunan terhadap total pengeluaran pemerintah daerah. Ketiga, pada tahun 1990 – 1995, kebijakan pemerintah kabupaten simalungun lebih memprioritaskan pada pengeluaran pembangunan dibandingkan dengan pengeluaran rutinnya. Keempat, pada tahun 1996 – 2003, prioritas kebijakan anggaran untuk kabupaten simalungun lebih mengutamakan pada anggaran pengeluaran rutin dibandingkan dengan anggaran pengeluaran pembangunan.

Tabel 4.4. Perkembangan Pengeluaran Pembangunan, Pengeluaran Rutin, Dan Persentase Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Simalungun (jutaan rupiah)

Tahun	Pemb.	% Total	Rutin	% Total	Total
1976	925	62.88	546	37.12	1471
1977	1115	60.93	715	39.07	1830
1978	1261	63.21	734	36.79	1995
1979	1391	52.41	1263	47.59	2654
1980	2189	57.77	1600	42.23	3789
1981	2063	52.60	1859	47.40	3922
1982	3874	66.67	1937	33.33	5811
1983	8561	79.53	2204	20.47	10765
1984	2679	50.56	2620	49.44	5299
1985	3684	54.03	3135	45.97	6819
1986	2196	31.04	4878	68.96	7074
1987	1955	27.90	5052	72.10	7007
1988	6108	49.93	6126	50.07	12234
1989	4662	37.61	7733	62.39	12395
1990	9207	55.13	7495	44.87	16702
1991	11840	59.79	7962	40.21	19802
1992	15830	61.60	9867	38.40	25697
1993	19424	61.89	11962	38.11	31386
1994	15300	53.13	13500	46.88	28800
1995	17400	50.73	16900	49.27	34300
1996	22300	26.08	63200	73.92	85500
1997	24900	25.67	72100	74.33	97000
1998	32500	27.68	84900	72.32	117400
1999	32800	22.70	111700	77.30	144500
2000	36500	26.49	101300	73.51	137800
2001	95100	28.49	238700	71.51	333800
2002	114100	31.22	251400	68.78	365500
2003	168100	36.30	295000	63.70	463100

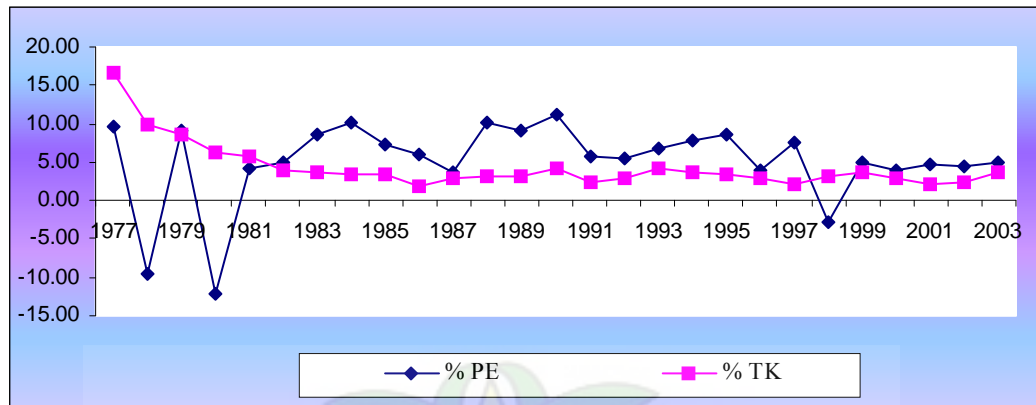
Sumber : Data Olahan, Simalungun dalam Angka (BPS)

Berdasarkan analisis yang dikemukakan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa kebijakan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten simalungun mempunyai sasaran dan skala prioritas yang jelas dalam pengalokasian anggarannya. Pada awal-awal orde baru, prioritas pembangunan di

kabupaten Simalungun lebih mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur). Namun pada pertengahan tahun 1990-an hingga sekarang, kebijakan anggaran yang dijalankan pemerintah kabupaten Simalungun lebih memprioritaskan pada pembangunan yang bersifat rutin, yaitu untuk peningkatan dan pemberdayaan aparatur pemerintah.

4.3. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Dalam pembangunan nasional, perkembangan jumlah tenaga kerja masih menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Perkembangan tenaga kerja tersebut seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas dari tenaga kerjanya sehingga kemampuan tenaga kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pada akhirnya dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kesempatan kerja dan dalam penyebaran penduduk antar daerah, tentunya dapat mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional dan sektoral yang tentunya akan menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun laju pertumbuhan daerah.



Gambar 4.3. Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Simalungun Tahun 1977 – 2003 (persen)

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, pada tahun 1977 – 1980, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 1978 dan 1980, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun mengalami laju pertumbuhan yang negatif hingga di bawah –10 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan tenaga kerjanya selama kurun waktu yang sama memperlihatkan perkembangan yang terus menurun dari 16,56 persen pada tahun 1977 menjadi 6,16 persen pada tahun 1980 dan terus mengalami laju pertumbuhan yang menurun hingga tahun 1982. Dan sejak tahun 1982 – 2003, perkembangan laju pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Simalungun menunjukkan perkembangan yang relatif stabil.

Sementara itu, untuk kurun waktu 1980 – 2003, perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, kecuali pada tahun 1998 yang mengalami pertumbuhan minus hingga

mencapai $-2,76$ persen sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia. Namun demikian, pasca krisis moneter tersebut, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan mengalami laju pertumbuhan yang relatif meningkat dari tahun 1999 – 2003 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 4,58 persen per tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 1977 – 2003, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan tenaga kerjanya untuk kurun waktu yang sama, kecuali pada tahun 1998 dimana laju pertumbuhan ekonominya mengalami pertumbuhan yang negatif. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut diharapkan nantinya mampu meningkatkan kesempatan kerja yang semakin besar di Kabupaten Simalungun. Disamping itu, perkembangan laju pertumbuhan tenaga kerja yang relatif stabil dapat memudahkan dalam perencanaan dan pencapaian target dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Simalungun untuk masa yang mendatang.

4.4. Analisis dan Hasil Estimasi

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun maka dilakukan estimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang menggunakan Program Eviews versi 4.1. dan diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5. Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun dengan Metode OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-764900.3	474864.2	-1.610777	0.1215
PP	-3.364554	4.295253	-0.783319	0.4418
PR	4.035777	2.903039	1.390191	0.1784
TK	4.045645	2.330900	1.735658	0.0966
PE(-1)	0.752556	0.157266	4.785241	0.0001
R-squared	0.984897	F-statistic		358.6553
Durbin-Watson stat	2.129837	Prob(F-statistic)		0.000000

Selanjutnya dari Tabel 4.5 di atas, dapat dibuat ke dalam suatu model persamaan yakni :

$$PE = -764900,3 - 3,365 PP + 4,036 PR + 4,046 TK + 0,753 PE(-1)$$

t-stat (-0,783) (1,390) (1,736) * (4,785) ***

Catatan :

*** signifikan pada $\alpha = 5 \%$

* signifikan pada $\alpha = 10 \%$

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat dilihat nilai koefisien regresi, nilai T-statistik, nilai F-statistik, nilai R-squared dan nilai Durbin-Watson test yang dapat digunakan untuk menganalisis *overall test* dan *partial test*. Kemudian dari model persamaan tersebut dapat dijelaskan pengaruh variabel independen (variabel bebas), yaitu pengeluaran pembangunan (PP), pengeluaran rutin (PR), tenaga kerja (TK), dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya {PE(-1)} terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun. Berikut ini akan dilakukan analisis dan interpretasi dari model persamaan di atas, baik secara *overall test* maupun *partial test*.

4.4.1. Interpretasi Hasil Estimasi

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,9849 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut, yakni pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan tenaga kerja ternyata mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi (PE) di kabupaten Simalungun sebesar 98,49 persen selama kurun waktu penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model persamaan.

Selanjutnya bila dianalisis secara lebih mendalam dengan melihat variabel bebasnya secara simultan (bersamaan), maka pengaruh variabel bebas dalam persamaan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Hal ini bisa dilihat dari hasil estimasi F_{stat} sebesar 358,655 yang lebih besar dari F_{tabel} sebesar 4,310 pada level 1 persen $\{ F_{\text{stat}}(358,655) > F_{\text{tabel}}(4,310) \}$.

Namun apabila dilakukan pengujian secara parsial (uji masing-masing variabel bebas), maka hasil estimasi tersebut memperlihatkan bahwa variabel bebas yakni tenaga kerja (TK) dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya $\{PE(-1)\}$ memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi (PE) di kabupaten Simalungun dengan tingkat kepercayaan pada 90 persen dan 99 persen. Sedangkan untuk variabel pengeluaran pembangunan (PP) dan pengeluaran rutin (PR) tidak memberikan pengaruh yang berarti secara statistik

terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun selama periode penelitian, yakni dari tahun 1976 - 2003.

4.4.1.1. Variabel Pengeluaran Pembangunan (PP)

Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pembangunan di Kabupaten Simalungun memiliki tanda koefisien regresi yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun sebesar -3,365 dengan nilai t-statistik sebesar -0,783. Hal ini memberi arti apabila pengeluaran pembangunan mengalami peningkatan sebesar 1 miliar rupiah, *ceteris paribus*, maka akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun sebesar 3,365 miliar rupiah. Nilai yang diestimasi bertanda negatif ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun, *ceteris paribus*.

Namun, dilihat dari hasil uji t-statistiknya menunjukkan bahwa nilai t-statistik dari variabel pengeluaran pembangunan sebesar -0,783 dan ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar -1,717 pada tingkat kepercayaan 90 persen. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pembangunan memberikan pengaruh yang negatif tetapi tidak berarti secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun pada tingkat kepercayaan 90 persen selama kurun waktu penelitian, yakni dari tahun 1976 – 2003. Hasil temuan ini ternyata sejalan dan semakin menguatkan hasil studi

sebelumnya yang dilakukan oleh Devarajan, Swaroop dan Zou (1996), dan Kweka dan Morrissey (2000).

Berdasarkan hasil temuan di atas memperlihatkan bahwa anggaran pengeluaran pembangunan yang dialokasikan setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten simalungun ternyata belum menunjukkan pengaruh yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, bahkan selama kurun waktu penelitian tersebut memperlihatkan pengaruhnya yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Hal ini dikarenakan kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan tersebut belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Sehingga dampak dari anggaran pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun relatif masih kecil.

4.4.1.2. Variabel Pengeluaran Rutin (PR)

Dari hasil estimasi di atas memperlihatkan bahwa variabel pengeluaran rutin di kabupaten simalungun memiliki tanda koefisien regresi yang positif sebesar 4,036 dengan nilai t-statistik sebesar 1,390. Hal ini mengandung arti apabila pengeluaran rutin di kabupaten simalungun mengalami peningkatan sebesar 1 miliar rupiah, *ceteris paribus*, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun sebesar 4,036 miliar rupiah selama kurun waktu penelitian. Nilai yang diestimasi bertanda positif dari variabel pengeluaran rutin telah sesuai dengan

hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pengeluaran rutin dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun, *ceteris paribus*.

Selanjutnya dari hasil uji t–statistik menunjukkan bahwa nilai t–statistik dari variabel pengeluaran rutin di kabupaten simalungun mempunyai nilai sebesar 1,390 dan ternyata lebih kecil nilainya bila dibandingkan dengan nilai t–tabel sebesar 1,717. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rutin di kabupaten simalungun memberikan pengaruh yang positif tetapi tidak berarti pengaruhnya secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun pada tingkat kepercayaan 90 persen selama kurun waktu penelitian, yakni dari tahun 1976 – 2003.

Berdasarkan hasil temuan di atas memperlihatkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran rutin di kabupaten simalungun ternyata belum mampu dan produktif dalam mendorong perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk pengeluaran rutin yang dianggarkan setiap tahunnya untuk Kabupaten Simalungun, yakni pengeluaran rutin untuk operasional aparatur pemerintah dan operasional kantor pemerintahan belum mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pengoperasionalannya, sehingga kecenderungan meningkatnya pengeluaran rutin setiap tahunnya belum berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Simalungun.

4.4.1.3. Variabel Jumlah Tenaga Kerja (TK)

Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat dilihat bahwa variabel jumlah tenaga kerja di kabupaten simalungun memiliki tanda koefisien regresi yang positif sebesar

4,046 dengan nilai t-statistik sebesar 1,736. Hal ini menunjukkan apabila jumlah tenaga kerja di kabupaten simalungun mengalami peningkatan sebesar 1000 orang, *ceteris paribus*, maka akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun sebesar 4,046 miliar rupiah selama kurun waktu penelitian dari tahun 1976 – 2002. Nilai yang diestimasi bertanda positif untuk variabel tenaga kerja telah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun, *ceteris paribus*.

Kemudian berdasarkan uji t-statistik untuk variabel jumlah tenaga kerja di kabupaten simalungun menunjukkan nilai t-statistiknya memiliki nilai sebesar 1,736 dan ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 1,717. Hal ini memberi arti bahwa variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun pada tingkat kepercayaan 90 persen.

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa variabel jumlah tenaga kerja di kabupaten simalungun untuk kurun waktu penelitian ternyata mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi dari variabel tenaga kerja dan nilai t-statistiknya. Dengan demikian, perkembangan jumlah tenaga kerja di kabupaten simalungun untuk periode 1976 – 2003 ternyata masih mampu diserap

oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja selama kurun waktu tersebut, mampu memberikan peranan yang positif dalam mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Simalungun.

4.4.1.4 Variabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun Sebelumnya {PE(-1)}

Selanjutnya, dari hasil estimasi tersebut dapat dilihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya di kabupaten simalungun memiliki tanda koefisien regresi yang positif sebesar 0,753 dengan nilai t-statistik sebesar 4,785. Hal ini menunjukkan apabila pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya di kabupaten simalungun mengalami peningkatan sebesar 1 miliar rupiah, *ceteris paribus*, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di kabupaten simalungun sebesar 0,753 miliar rupiah selama kurun waktu penelitian. Nilai yang diestimasi bertanda positif telah sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di kabupaten simalungun, *ceteris paribus*.

Kemudian berdasarkan uji t-statistik untuk variabel pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya di kabupaten simalungun menunjukkan nilai t-statistiknya memiliki nilai sebesar 4,785 dan ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 2,819. Hal ini mengandung arti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten simalungun pada tingkat kepercayaan 99 persen.

Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya di kabupaten simalungun ternyata memberikan pengaruh yang positif dan signifikan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan di daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Simalungun masih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi tahun sebelumnya. Disamping itu untuk menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, pada umumnya menggunakan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan dalam memproyeksi maupun menentukan pertumbuhan ekonomi yang akan datang.

4.4.2. Analisis Overall - Test

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang ada, yakni pengeluaran pembangunan (PP), pengeluaran rutin (PR), tenaga kerja (TK), dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya $\{PE(-1)\}$ mampu secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PE) di kabupaten simalungun selama kurun waktu 1976 – 2003. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas tersebut maka dapat dilakukan analisis melalui uji F. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dimana $F - \text{statistik} > F - \text{tabel}$ ($358,655 > 4,310$) dengan demikian semua variabel bebas yang ada dalam model persamaan tersebut, yakni pengeluaran pembangunan (PP), pengeluaran rutin (PR), jumlah tenaga kerja (TK), dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya $\{PE(-1)\}$ secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pertumbuhan

ekonomi (PE) di kabupaten simalungun secara statistik pada tingkat kepercayaan 99 persen untuk kurun waktu 1976 – 2003.

4.5. Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Multikollinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya *multicollinearity* dalam model estimasi tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 (R-squared) yang dihasilkan dari estimasi model persamaan yang ada. Angka R^2 yang tinggi disertai koefisien regresi yang tidak signifikan biasanya menandakan terdapatnya *multicollinearity*. Dari hasil estimasi model diatas diperoleh nilai R^2 sebesar 98,49 persen dan tingkat signifikansi dari variabel bebas berdasarkan uji t-statistik menunjukkan tidak semua variabel bebas dalam model estimasi tersebut berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat *multicollinearity*.

Di samping itu pengertian *multicollinearity* adalah adanya korelasi yang kuat diantara variabel bebasnya dari model persamaan tersebut. Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan melihat kuatnya hubungan diantara variabel bebasnya, dimana untuk ukuran hubungan yang kuat apabila $r > 0,5$. Berikut ini hasil uji *multicollinearity* dengan *correlation matrix* seperti pada Tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6. Hasil Estimasi Correlation Matrix

	PP	PR	TK	PE(-1)
PP	1.000000	0.468945	0.237719	0.067450
PR	0.468945	1.000000	0.178699	0.421103
TK	0.237719	0.178699	1.000000	0.326933
PE(-1)	0.067450	0.421103	0.326933	1.000000

Sumber : Data diolah (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai korelasi antar variabel bebas adalah lebih kecil dari 0,5 maka mengikuti *rule of thumb* dari metode ini dapat disimpulkan bahwa dalam model persamaan tersebut tidak ditemukan adanya *multicollinearity*.

4.5.2. Korelasi Serial (*Autokorelasi*)

Untuk mendianogsis ada tidaknya korelasi serial (*autokorelasi*), dapat dilakukan dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM test). Uji ini ternyata lebih baik dibandingkan dengan *Durbin Watson test*, karena lebih muda untuk diinterpretasikan dan dapat diterapkan untuk regresi yang menggunakan variabel *lagged* sekalipun. Berikut ini hasil estimasi dari LM test seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7. Hasil Estimasi Uji LM Test

F-statistic	0.235588	Probability	0.632436
Obs*Rata-rata-squared	0.299539	Probability	0.584172

Sumber : Data diolah (Lampiran 4)

Berdasarkan hasil estimasi LM test di atas, ternyata besarnya nilai χ^2_{hitung} ($Obs * R-squared$) = 0,299 lebih kecil dari nilai $\chi^2_{tabel} = 9,488$ { $\chi^2_{hitung (0,299)} < \chi^2_{tabel (9,488)}$ } pada level signifikan 5 persen. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak ada *autokorelasi* diterima. Artinya dalam model yang diestimasi tersebut tidak mengandung korelasi serial (*autokorelasi*) antar faktor pengganggu (*error term*).

4.5.3. Uji Linieritas (*Ramsey Reset Test*)

Uji ini dilakukan berkaitan dengan masalah spesifikasi kesalahan model yakni apakah spesifikasi model yang kita gunakan sudah benar atau tidak, sehingga melalui uji linearitas ini dapat diketahui bentuk model empiris (berbentuk linier, kuadrat, atau kubik) dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan dalam model empiris. Berikut ini dapat dilihat hasil estimasi dari *Ramsey test* seperti Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8. Hasil Estimasi *Ramsey Test*

F-statistic	3.153933	Probability	0.190238
Log likelihood ratio	3.777970	Probability	0.151932

Sumber : Data diolah (Lampiran 5)

Berdasarkan hasil estimasi *Ramsey test* di atas, diperoleh besarnya nilai F-hitung sebesar 3,154, yang berarti nilai F-hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai F-tabel sebesar 4,310 $\{F \text{ hitung }_{(3,154)} < F \text{ tabel }_{(4,310)}\}$ pada level signifikan 1 persen. Dengan demikian, melalui *Ramsey test* ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan spesifikasi model yang digunakan dalam bentuk linier adalah benar tidak dapat ditolak. Ini berarti spesifikasi model persamaan yang benar dalam model regresi tersebut adalah dalam bentuk linier yakni $PE = f \{PP, PR, TK\}$.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun menunjukkan pertumbuhan yang relatif meningkat pasca krisis moneter walaupun laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi sebelum krisis moneter.
2. Berdasarkan kontribusi sektoral, sektor pertanian mendominasi dalam pembentukan PDRB kabupaten Simalungun, diikuti sektor industri, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Namun pada tahun 2003, sektor jasa-jasa telah menggeser peranan sektor perdagangan di kabupaten Simalungun.
3. Dalam prioritas kebijakan anggaran, ternyata rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran pembangunan di kabupaten Simalungun masih lebih besar dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran rutin selama kurun waktu 1976 – 2003.
4. Untuk kurun waktu 1977 – 2003, perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan laju pertumbuhan tenaga kerjanya untuk kurun waktu yang sama,

5. kecuali pada tahun 1998 dimana laju pertumbuhan ekonominya mengalami pertumbuhan yang negatif.
6. Untuk variabel pengeluaran pembangunan memberikan pengaruh yang negatif, sedangkan variabel pengeluaran rutin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun, tetapi baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin tidak memberikan pengaruh yang berarti secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun selama kurun waktu 1976 - 2003.
7. Untuk variabel jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun dengan tingkat kepercayaan 90 persen dan 99 persen.
8. Dari hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Kabupaten Simalungun, baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin belum memberikan dampak yang berarti dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Simalungun.

5.2. Saran dan Implikasi Kebijakan

Dari hasil analisis yang dilakukan maka ada beberapa saran dan kebijakan buat pengambil kebijakan (*decision maker*) dan pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di kabupaten Simalungun, maka sektor pertanian harus lebih ditingkatkan lagi peranannya dalam menggerakkan roda perekonomian, disamping tetap mendorong peningkatan sektor industri dan sektor-sektor lainnya.

2. Untuk meningkatkan peran sektor sekunder dan tersier dalam kontribusinya terhadap perekonomian di kabupaten Simalungun, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja di sektor tersebut, seperti memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan dan memberikan insentif untuk sektor-sektor tersebut.
3. Agar pengaruh pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan berkontribusi nyata dalam perekonomian kabupaten Simalungun, maka pemerintah kabupaten Simalungun harus memiliki skala prioritas dalam menjalankan kebijakan anggarannya.
4. Bagi para peneliti yang berminat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maka sebaiknya mempertimbangkan unsur kebijakan pemerintah yang terkait dengan UU otonomi daerah dan undang-undang berinvestasi sehingga dapat mendukung hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : UI – Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Simalungun Dalam Angka*. Berbagai Edisi.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Sumatera Utara Dalam Angka*. Berbagai Edisi.
- Bakir, Zainab dan Chris Manning. 1984. *Angkatan Kerja di Indonesia : Partisipasi, Kesempatan dan Pengangguran*. Jakarta : Rajawali.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Bustaman, Nawarti. 2004. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Propinsi Riau*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Medan : Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Pascasarjana Universitas Sumatra Utara (USU).
- Devarajan, Shantanayan, Vinaya Swaroop, Heng-fu Zou. 1996. *The Composition of Public Expenditure and Economic Growth*. USA.
- Departemen Keuangan RI. 2004.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hanum, Nurlaila. 2004. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Medan : Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Pascasarjana USU.
- Insukindro. 1993. *Ekonomi Uang dan Bank : Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.

-----, 2000. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Kerjasama Bank Indonesia Dengan Program Studi MEP UGM. Yogyakarta.



- International Monetary Fund. 1993. *Government Statistic Yearbook*. New York : Publishing.
- Jhingan, ML. 1995. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kusumosuwidho, Sisdjiatmo. 1981. *Angkatan Kerja, Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta : Lembaga Demografi FEUI.
- Kweka, Josaphat P dan Oliver Morrissey. 2000. *Government Spending and Economic Growth in Tanzania, 1965-1996*. Credit Research Paper. University of Nottingham.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1984. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia, Substansi dan Urgensi*. Jakarta : Gramedia.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Musgrave, Richard A dan Peggy B. 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nurlina. 2004. *Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Medan : Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Pascasarjana USU.
- Parulian, T. 2003. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Medan : MEP USU.
- Reksohadiprodjo. 1999. *Ekonomika Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Sagir, Suharsono. 1984. Politik Anggaran Pemerintah Orde Baru. Jakarta : *Prisma*, No.5 Thn VIII, LP3ES.

Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : LPFE – UI.

Sjoberg, Peter. 2003. *Government Expenditure Effect on Economic Growth : The Case of Sweden 1960-2001*. Lulea University of Technology.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

-----, 1990. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE.

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Tambunan, Tulus. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghallia Indonesia.

-----, 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia : Teori & Penemuan Empiris*. Jakarta : Salemba Empat.

Widodo, HG Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.

-----, 1997. *Ekonomi Indonesia, Fakta dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi*. Yogyakarta : Kanisius.

**Lampiran 1. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PE), Pengeluaran
Pembangunan (PP), Pengeluaran Rutin (PR), Tenaga
Kerja (TK) Kabupaten Simalungun Tahun 1976 – 2003**

Tahun	PE	PP	PR	TK
1976	67701.00	925.0000	546.0000	136192.0
1977	101601.0	1115.000	715.0000	158750.0
1978	105984.0	1261.000	734.0000	174413.0
1979	150706.0	1391.000	1263.000	189312.0
1980	172308.0	2189.000	1600.000	200969.0
1981	201726.0	2063.000	1859.000	212441.0
1982	224873.0	3874.000	1937.000	220833.0
1983	293159.0	8561.000	2204.000	228845.0
1984	367873.0	2679.000	2620.000	236532.0
1985	404847.0	3684.000	3135.000	244858.0
1986	445219.0	2196.000	4878.000	249347.0
1987	520822.0	1955.000	5052.000	256257.0
1988	662538.0	6108.000	6126.000	264193.0
1989	769081.0	4662.000	7733.000	272645.0
1990	917540.0	9207.000	7495.000	284320.0
1991	1022323.	11840.00	7962.000	291294.0
1992	1204006.	15830.00	9867.000	299378.0
1993	1343860.	19424.00	11962.00	311578.0
1994	1727300.	15300.00	13500.00	323213.0
1995	1944480.	17400.00	16900.00	334588.0
1996	2061970.	22300.00	63200.00	343873.0
1997	2211980.	24900.00	72100.00	351250.0
1998	3437820.	32500.00	84900.00	362114.0
1999	3659230.	32800.00	111700.0	375248.0
2000	3706300.	36500.00	101300.0	385661.0
2001	4210690.	95100.00	238700.0	393592.0
2002	4610353.	114100.0	251400.0	403210.0
2003	5016280.	168100.0	295000.0	418397.0

Lampiran 2. Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun Tahun 1976 – 2003 dengan Metode OLS

Dependent Variable: PE

Method: Least Squares

Date: 09/19/06 Time: 05:30

Sample(adjusted): 1977 2003

Included observations: 27 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-764900.3	474864.2	-1.610777	0.1215
PP	-3.364554	4.295253	-0.783319	0.4418
PR	4.035777	2.903039	1.390191	0.1784
TK	4.045645	2.330900	1.735658	0.0966
PE(-1)	0.752556	0.157266	4.785241	0.0001
R-squared	0.984897	Mean dependent var		1536847.
Adjusted R-squared	0.982150	S.D. dependent var		1549496.
S.E. of regression	207015.9	Akaike info criterion		27.48456
Sum squared resid	9.43E+11	Schwarz criterion		27.72452
Log likelihood	-366.0415	F-statistic		358.6553
Durbin-Watson stat	2.129837	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3. Hasil Estimasi Correlation Matrix

	PP	PR	TK	PE(-1)
PP	1.000000	0.468945	0.237719	0.067450
PR	0.468945	1.000000	0.178699	0.421103
TK	0.237719	0.178699	1.000000	0.326933
PE(-1)	0.067450	0.421103	0.326933	1.000000

Lampiran 4. Hasil Estimasi LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.235588	Probability	0.632436
Obs*R-squared	0.299539	Probability	0.584172

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/19/06 Time: 08:23

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	109160.2	438310.6	0.249048	0.8057
PP	-0.207039	4.529141	-0.045713	0.9640
PR	-0.392491	3.068391	-0.127914	0.8994
TK	-0.558988	2.116107	-0.264158	0.7942
PE(-1)	0.056444	0.194191	0.290661	0.7742
RESID(-1)	-0.136920	0.282091	-0.485374	0.6324
R-squared	0.011094	Mean dependent var		1.98E-10
Adjusted R-squared	-0.224360	S.D. dependent var		190427.0
S.E. of regression	210708.9	Akaike info criterion		27.54747
Sum squared resid	9.32E+11	Schwarz criterion		27.83544
Log likelihood	-365.8909	F-statistic		0.047118
Durbin-Watson stat	2.055951	Prob(F-statistic)		0.998471

Lampiran 5. Hasil Estimasi *Ramsey Test*

Ramsey RESET Test:

F-statistic	3.153933	Probability	0.190238
Log likelihood ratio	3.777970	Probability	0.151932

Test Equation:

Dependent Variable: PE

Method: Least Squares

Date: 09/19/06 Time: 08:28

Sample: 1977 2003

Included observations: 27

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27430.14	248455.2	0.110403	0.9131
PP	0.769293	1.830952	0.420160	0.6786
PR	7.124206	5.138593	1.386412	0.1802
TK	-0.432344	1.592207	-0.271537	0.7886
PE(-1)	1.433089	0.406904	3.521935	0.0020
FITTED^2	-1.45E-07	1.13E-07	-1.287423	0.2120
R-squared	0.986869	Mean dependent var		1536847.
Adjusted R-squared	0.983742	S.D. dependent var		1549496.
S.E. of regression	197570.1	Akaike info criterion		27.41870
Sum squared resid	8.20E+11	Schwarz criterion		27.70667
Log likelihood	-364.1525	F-statistic		315.6466
Durbin-Watson stat	2.291510	Prob(F-statistic)		0.000000